

## EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Gresik Jawa Timur)

Diaz Iklasul Amal<sup>1</sup> Radjikan<sup>2</sup> Muhammad Roisul Basyar<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

[diazikhlusal@gmail.com](mailto:diazikhlusal@gmail.com)  
[roisulbasyar@untag-sby.ac.id](mailto:roisulbasyar@untag-sby.ac.id)  
[radjikan@untag-sby.ac.id](mailto:radjikan@untag-sby.ac.id)

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

### Retensi

### ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana khususnya bencana banjir di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diambil dari jurnal, buku, dan referensi lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori *Ripley and Franklin*, dengan indikator kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, dan terjadinya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penelitian ini membahas tata cara dan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di kabupaten gresik.

**Kata Kunci:** Bencana Banjir; Penyelenggaraan Bencana; Kolam

### ABSTRACT

*This research focuses on the Regional Regulation of Gresik Regency Number 7 of 2012 regarding the Implementation of Flood Disaster Management. The aim of this research is to evaluate the Regional Regulation Number 7 of 2012 concerning the management of disasters, particularly floods, in Gresik Regency. This study uses a descriptive qualitative method with the collection of primary and secondary data. Primary data is obtained from observations, interviews, and documentation. Meanwhile, secondary data is taken from journals, books, and other relevant references. This research applies the theory of Ripley and Franklin, with indicators of compliance, smoothness of routine functions, and the occurrence of desired performance and impact. The results of this study discuss the procedures and organization of flood disaster management in Gresik Regency.*

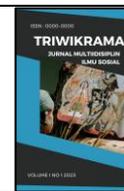
**Keywords:** Flood Disaster; Disaster Management; Retention Pond

### 1. PENDAHULUAN

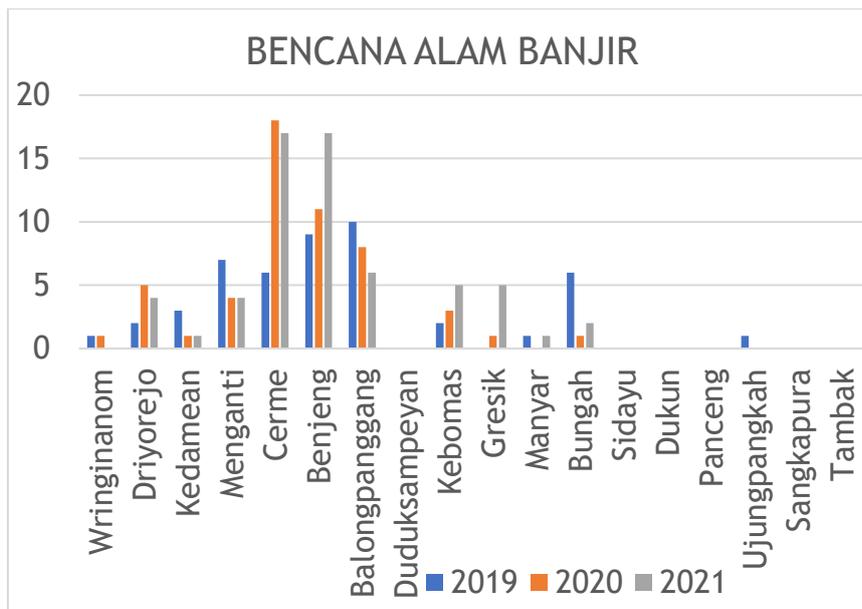
Bencana alam banjir di Indonesia tampaknya dari tahun ketahun memiliki kecenderungan meningkat, begitu juga bencana banjir setiap tahun terjadi di seluruh pejuruan tanah air. Kecenderungan meningkatnya bencana banjir di Indonesia tidak hanya luasnya saja melainkan kerugian yang juga ikut bertambah pula, jika dahulunya bencana banjir hanya melanda kota-kota besar di Indonesia, akan tetapi pada saat sekarang ke pelosok tanah air. Lima faktor penting penyebab banjir di Indonesia yaitu : faktor penghujan, faktor retensi daerah aliran sungai (DAS), faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana (Hermon, 2012). Bencana

\*Corresponding author

E-mail addresses: [diazikhlusal@gmail.com](mailto:diazikhlusal@gmail.com)

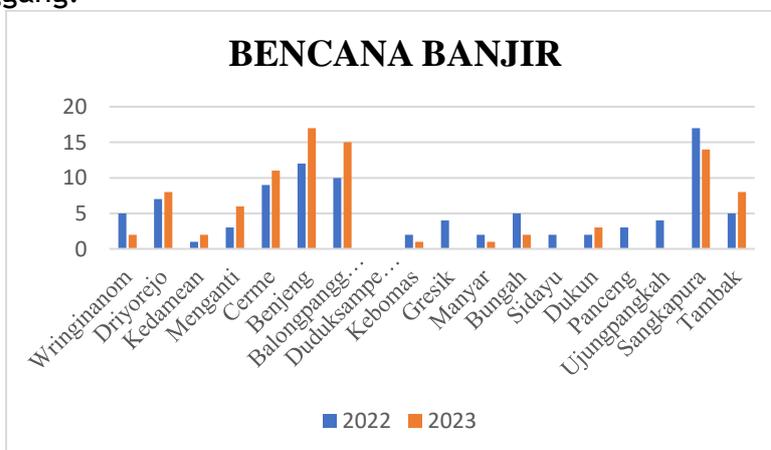


banjir hampir setiap musim penghujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup tinggi. Kejadian bencana banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik dan pasang surut air laut. Di samping itu adapun faktor ulah manusia juga yang berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, pembuangan sampah kedalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah daratan banjir dan sebagainya. (Rondius 2019)



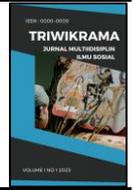
Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan di tahun 2019 kecamatan Balongpanggung menduduki posisi pertama yang dilanda bencana banjir disusul dengan kecamatan Benjeng dan yang ketiga kecamatan Menganti. Sedangkan, pada tahun 2020 dalam tabel diatas menunjukkan kecamatan cerme menduduki posisi pertama yang dilanda bencana banjir disusul dengan kecamatan Benjeng dan yang ketiga kecamatan Balongpanggung. Kemudian di tahun 2021 kecamatan Benjeng dan Cerme sama-sama mengalami banjir parah lalu dibawahnya ada kecamatan Balongpanggung.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas bencana banjir pada tahun 2022 menunjukkan kecamatan Sangkapura yang berada di pulau bawean, dilanda banjir parah lalu dibawahnya ada kecamatan Benjeng. Di tahun 2023 kecamatan Benjeng menempati posisi pertama sebagai kecamatan yang



dilanda banjir dengan debit air tertinggi, kemudian disusul oleh kecamatan balongpanggung dan kecamatan sangkapura. Pada musim penghujan, sungai Kali Lamong tidak bisa menampung semua debit yang masuk, akibatnya terjadi banjir di daerah DAS Kali.Lamong. Salah satu DAS Kali Lamong yang sering mengalami banjir adalah Kabupaten Gresik. Wilayah pada Kabupaten Gresik yang selalu mengalami bencana banjir yaitu: Kecamatan Balongpanggung, Benjeng, Morowudi, Bringkang, Cerme dan Menganti.

Wilayah-wilayah rawan ini ada beberapa desa seperti di Balongpanggung, Benjeng, Cerme, Menganti, Kedamean, Driyorejo, dan Wringinanom. Dilokasi tersebut, selain dilakukan normalisasi aliran sungai, pihaknya juga melakukan penguatan tanggul dan pembangunan kolam-kolam retensi guna menampung luapan air sungai Kali Lamong. PEMKAB Gresik mengerjakan proyek pembangunan kolam retensi. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani beserta jajarannya menggagas proyek tersebut bagian dari program Nawa Karsa untuk meminimalisir banjir di Gresik lokasi pembuatan kolam retensi ada di Desa Tambakberas, Kecamatan Cerme, Gresik. Luas kolam retensi kurang lebih mencapai 9 hektar termasuk kolam disposal dan kolam utama. Kedepannya rencana pembangunan kolam retensi tersedia di 9 titik mulai dari hulu hingga hilir.

. Dari semua pemaparan permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Gresik tersebut perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terutama bencana banjir. Berdasarkan dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis skripsi yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gresik Dalam Penanggulangan Bencana Banjir”.

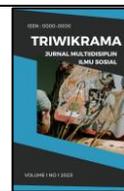
## **TINJAUAN PUSTAKA KEBIJAKAN PUBLIK**

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho 2009:11). Sebagaimana dijelaskan Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara.

Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Dalam kaitan ini, Dye (2002:1) mengartikan kebijakan publik sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”. Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik dalam pandangan Dye dan Anderson, bukan sekadar keputusan yang menghasilkan aktivitas-aktivitas yang terpisah. Sebagaimana dilihat Richard Rose, kebijakan dipandang sebagai serangkaian panjang aktivitas yang saling berhubungan (Anderson 2000). Makna kebijakan Dye maupun Anderson, tidak semata-mata berkaitan dengan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan pemerintah, tetapi lebih dari itu, kebijakan publik menyangkut sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik.

## **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi dipadankan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Dalam arti spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn 2003). Ketika hasil kebijakan memiliki nilai,



hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Hal ini mengandung arti pula, bahwa suatu kebijakan atau program telah mencapai kinerja yang bermakna, yang berarti masalah-masalah kebijakan yang dibuat telah jelas dan dapat diatasi. Setiap evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi seorang analis untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Ciri-ciri evaluasi kebijakan dimaksud di antaranya (1) tujuannya menemukan hal-hal strategis, untuk meningkatkan kinerja kebijakan, (2) evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana, dan target kebijakan, (3) prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, (4) dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan dan kebencian, (5) mencakupi rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan (Nugroho 2009).

### **Evaluasi Kebijakan menurut Ripley and Franklin**

Ripley dan Franklin dalam (Winarmo, 2014:148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Teori Ripley dan Franklin ingin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah ada kepatuhan terhadap kebijakan yang ada, pada tahap selanjutnya melihat kelancaran pelaksanaan rutinitas fungsi, serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Ada 3 indikator yang diusulkan oleh Ripley and Franklin sebagai kriteria evaluasi, yaitu:

#### **1. Kepatuhan**

Sebagai implementor terhadap kebijakan yang telah diptuskan, kesatuan perintah itu merupakan hal yang harus diperhatikan sehingga kesiapan mental dan sikap sudah harus dipersiapkan untuk mengantisipasi tekanan dan faktor eksternal dan empiris dilapangan. Dengan adanya kepatuhan terhadap isi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan tersebut telah merujuk kepada teori atau isi dari kebijakan yang sebenarnya. Maksudnya kebijakan tersebut telah diimplementasikan sebagaimana semestinya. Dengan cara inilah tujuan dari kebijakan mungkin bisa dicapai dengan cara efektif dan efisien.

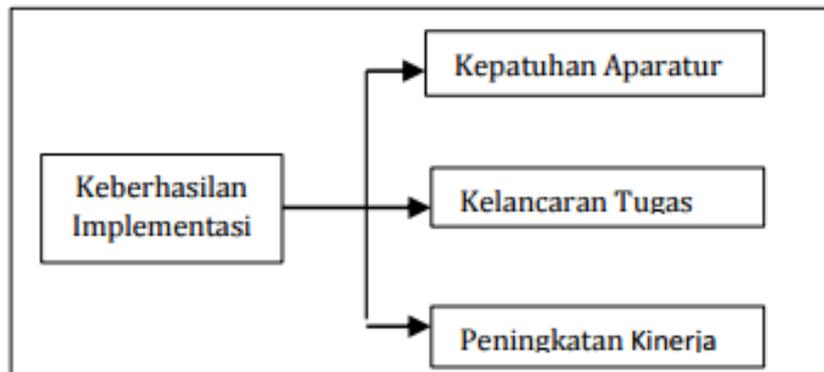
#### **2. Kelancaran Rutinitas Fungsi**

Setiap implementor harus dapat memastikan bahwa tugas dan fungsi yang dilaksanakan berjalan secara lancar sehingga dapat meminimalisir masalah yang dihadapi. kebijakan yang sukses ditandai dengan lancarnya suatu aktivitas rutin fungsi serta tidak terdapat permasalahan yang dialami. Aktivitas rutin fungsi merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi.

#### **3. Terjadinya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki**

Setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan selalu bermuara pada peningkatan kinerja yang optimal sehingga dapat memberikan dampak yang baik dalam implementasi kebijakan. Menurut Ripley dan Franklin terdapat dua bagian dari keberhasilan implementasi. Yakni, terwujudnya kinerja kebijakan yang lebih merujuk kepada pencapaian hasil implementasi dalam jangka waktu yang sedikit, sedangkan terwujudnya dampak kebijakan merujuk pada pencapaian hasil pelaksanaan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Gambar Model Teori Ripley dan Franklin



Sumber : Buku Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. (Anis Ribcalia Septiana et al. 2023)

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara mendasar bergantung pada pengamatan. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Hardani, et al., 2020 : 54). Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data bersifat kasus (Karina, 2021). Metode kualitatif berguna untuk memperoleh data yang mendalam atau data yang sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian ini penulis memilih metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan kajian/masalah penelitian, dan penelitian ini akan mendeskripsikan Evaluasi kebijakan No.7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya bencana banjir di Kabupaten Gresik.

### Jenis dan Sumber Data

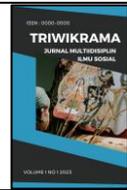
Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan perkataan dan tindakan manusia sebagai sumber data utama yang dilengkapi dan didukung data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum, penelitian mempunyai dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya atau sumber pertama. Data primer ini merupakan data yang dimaksudkan untuk menjawab fenomena penelitian. Pada penelitian ini yang dimaksudkan data primer adalah data-data yang didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada pada informan atau narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya dalam penelitian ini yang berhubungan langsung dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Gresik, yakni terkait BPBD Kabupaten Gresik, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Benjeng, Desa Morowudi dan Desa Deliksumber, serta satu warga di masing-masing desa tersebut. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau bukan dari sumber pertama. Pada penelitian ini ada beberapa data sekunder yang digunakan, diantaranya dokumen-dokumen dan artikel berita yang berhubungan langsung dengan fenomena yang diambil, jurnal penelitian, data statistik, dan yang lainnya.

### Pengumpulan Data

Secara umum, pengumpulan data kualitatif menggunakan beberapa teknik seperti, wawancara bertahap dan mendalam, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Adapun beberapa instrumen

\*Corresponding author

E-mail addresses: [diazikhlasil@gmail.com](mailto:diazikhlasil@gmail.com)



yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dijelaskan dibawah ini :

### 1. Wawancara

Pada penelitian wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sangat diperlukan ketika terjun langsung ke lapangan. Wawancara yang dilakukan dengan cara terbuka merupakan kegiatan wawancara yang mendalam, tidak berstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal. Pada penelitian ini pendekatan wawancara dengan petunjuk umum dipilih. Kerangka atau garis besar pokok pembicaraan akan ditulis peneliti dalam bentuk petunjuk wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan BPBD Gresik, Dinas PU, Dinas Sosial Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme, Desa Deliksumber dan Desa Morowudi, serta satu warga dari masing-masing desa tersebut.

### 2. Observasi

Observasi adalah proses pengambilan data atau informasi dengan cara mengamati secara langsung objek yang sedang dibahas atau diteliti guna mengetahui kondisi yang sebenarnya. Pada penelitian ini pengumpulan data observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*), yakni proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, akan tetapi tidak ikut terlibat secara langsung dengan kegiatan yang diamati. Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung ke tempat banjir tersebut.

### 3. Dokumentasi

Pada penelitian ini menggunakan dokumen yang merupakan catatan lalu. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa arsip-arsip ataupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gresik. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari berita-berita, social media, dan website, dari ketiga saluran tersebut penulis menemukan data-data banjir berupa angka.

## Analisi Data

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalan data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama

### 2. Reduksi Data

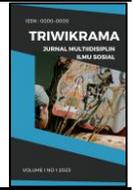
Semakin lama penelitian yang dilakukan, maka semakin banyaknya data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan tersebut. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data yang dilakukan berarti memilih hal-hal pokok, merangkum, dan juga memfokuskan hal-hal sesuai dengan topik maupun indikator variabelnya.

### 3. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, Langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Pada penelitian kuantitatif, penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel, grafik, dan yang lainnya. Sehingga data yang telah diperoleh bisa tersusun dan terorganisir dengan baik dan mudah dipahami.

### 4. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-



benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kepatuhan

Indikator Kepatuhan yang sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan, pihak berwenang harus mempertimbangkan kesatuan komando dan siap secara mental dan sikap untuk mengatasi tekanan serta faktor eksternal dan pengalaman di tempat kejadian.

Kepatuhan merupakan indikator yang dapat diketahui tingkat kepatuhan dari kebijakan yang telah diresmikan seperti peraturan daerah Kabupaten Gresik No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya bencana banjir. Tingkat kepatuhan Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 dalam menanggulangi bencana banjir sudah mencapai tingkat kepatuhan yang baik, hal itu dibuktikan dengan berbagai upaya pembangunan kolam retensi dan normalisasi Kali Lamong dan penanganannya sudah sesuai dengan *Standart Operational Procedure*.

Seperti yang ditulis oleh Ripley dan Fraklin, sebagai pelaksana implementasi terhadap kebijakan yang harus diperhatikan sehingga bentuk kesiapan mental dan sikap harus disiapkan dengan sempurna untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga di lapangan kejadian bencana. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari (Peirisal 2024) bahwa indikator kepatuhan harus berlandaskan pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas dan Cara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik.

#### 2. Kelancaran Rutinitas Fungsi

Pada Indikator Kelancaran Rutinitas Fungsi, Ripley dan Franklin sebagai aktor kebijakan mendefinisikan, setiap pelaksana harus mampu memastikan tugas dan fungsi yang dijalankan berjalan lancar untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi. Definisi tersebut mengartikan bahwa pihak berwenang melakukan penanganan dan pengawasan dalam meminimalisir masalah yang dihadapi di lapangan, seperti bencana banjir yang penulis teliti.

Indikator Kelancaran Rutinitas Fungsi ialah yang mengukur seberapa lancar pelayanan publik untuk aktivitas masyarakat. Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 yang menanggulangi kebencanaan khususnya bencana banjir belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini disebabkan belum tercukupinya bantuan dari instansi untuk mencukupi bantuan di Desa Deliksumber.

Pada hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari (Reno Sakti Wijayanto, Neny Marlina 2024), yang mengatakan responsivitas dari pihak pemerintah perlu penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga terpenuhi dengan lebih efektif yang bisa dikatakan dengan meminimalisir kejadian bencana tersebut. Hal itu sama dengan penelitian ini dengan respon BPBD untuk meminimalisir resiko kejadian bencana banjir di Kabupaten Gresik dengan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyalurkan bantuan seperti bantuan makanan, dapur umum, posko banjir, perahu dan kapal, dan lain-lain.



### 3. Terjadinya Kinerja Dan Dampak Yang Dikehendaki

Pada indikator ini, ahli Ripley dan Franklin mengatakan setiap kinerja yang diberikan dan setiap tanggung jawab yang harus diupayakan dan dimaksimalkan untuk mencapai peningkatan pencapaian kinerja yang terbaik, sehingga memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut merupakan hasil dari kinerja yang diberikan dengan hasil maju dan mundur, itu bergantung dengan kinerja pemerintah untuk mengelola dan menanganani suatu masalah yang terjadi di Lapangan.

Pada indikator ini Terjadinya Kinerja dan Dampak Yang Dikehendaki menjelaskan seberapa jauh tingkat kemajuan dari kinerja yang diciptakan. Di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum mencapai hasil yang memuaskan tetapi mempunyai dampak yang signifikan. Hal ini dibuktikan dari kinerja pembangunan kolam retensi dan normalisasi kali lamong yang direalisasikan tahun 2024 ini yang dikatakan mampu meminimalisir banjir yang sebelum adanya kolam retensi dan normalisasi durasi banjirnya kisaran 7 sampai 10 hari, kemudian setelah pembangunan kolam retensi dan normalisasi banjirnya bisa diminimalisir menjadi 3 sampai 4 hari saja.

Pada hal ini sejalan dengan penelitian tedahulu dari (Pambudi and Sunarharum 2023) mengenai pembangunan program untuk dampak yang signifikan terhadap penanganan banjir. Pada penelitian ini juga disebutkan pembangunan kolam retensi dan normalisasi anak sungai Kali Lamong untuk meminimalisir durasi banjir di Kabupaten Gresik. Namun, kejadian banjir ini tidak bisa dihilangkan karena letak Kabupaten Gresik berada di hilir sehingga pemerintah mengadakan program tersebut untuk meminimalisir kejadian banjir di Kabupaten Gresik.

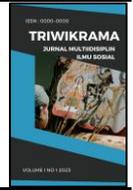
## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Terkait banjir di Kabupaten Gresik yang tidak bisa dihilangkan karena letak Kabupaten Gresik berada di hilir, tetapi bencana banjir ini bisa diminimalisir. Oleh karena itu, kepatuhan kebijakan, yang harus berpusat pada satu kesatuan komando dan siap secara mental dan fisik untuk mengatasi tekanan dan hal-hal yang terjadi di luar tempat kejadian. Kepatuhan harus mencapai tingkat kepatuhan yang sesuai dengan aturan, seperti yang ditunjukkan oleh upaya yang dilakukan untuk membangun kolam retensi dan normalisasi Kali Lamong, serta prosedur pengendalian yang sudah sesuai dengan surat standar operasional prosedur.

Terkait indikator terjadinya kinerja dan dampak yang dikehendaki mengenai pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai yang mengacu pada kinerja yang dihasilkan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik, sehingga memberikan dampak positif pada pelaksanaan kebijakan dan masyarakat yang merasakan dampaknya. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pembangunan kolam retensi dan normalisasi kali lamong pada tahun 2024. Diproyeksikan untuk mengurangi banjir yang terjadi sebelum pembangunan kolam retensi dan normalisasi adalah 7 hingga 10 hari, dan kemudian menjadi 3 hingga 4 hari setelah pembangunan. Geografis Kabupaten Gresik berada di hilir, sehingga banjir tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah membuat program untuk mengurangi tingkat banjir di wilayah tersebut.

Terkait indikator kelancaran Rutinitas Fungsi, yang memiliki arti, berarti bahwa setiap pelaksana harus mampu memastikan bahwa tugas dan fungsi yang diusahakan berjalan lancar. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah masalah yang muncul. Pihak berwenang menangani dan



mengawasi masalah yang dihadapi di lapangan, seperti bencana banjir yang penulis pelajari, sesuai dengan definisi tersebut. Dalam hal indikator kelancaran rutinitas fungsi, masih banyak yang harus ditingkatkan dan masalah yang terjadi harus diminimalkan. Selain itu, upaya untuk memberikan bantuan harus dimaksimalkan lagi.

## Saran

Penulis banyak mengetahui hal-hal baru di lapangan mengenai kondisi banjir, karena banjir ini tidak bisa dihindari karena letak Kabupaten Gresik berada di hilir. Saran penulis dalam penelitian ini terdapat penjelasan di bawah ini, yaitu:

### 1. Kelancaran Rutinitas Fungsi

Terkait kendala dari indikator rutinitas fungsi mengenai penyaluran bantuan, sebenarnya cukup mumpuni tetapi kurangnya pada saat fasilitas yang kurang mencukupi untuk dinas sosial yang belum memiliki kendaraan *pick up* untuk mengangkat kebutuhan pokok warga banjir seperti makanan. Kemudian pembangunan kolam retensi semoga cepat terealisasi dan tuntaskan normalisasi sungai karena itu jalan satu-satunya untuk meminimalisir banjir.

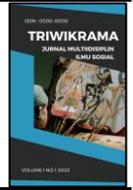
### 2. Terjadinya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

Saat ini masih satu kolam retensi saja yang masih menyisakan 8 titik pembangunan, upaya tersebut sangat signifikan untuk meminimalisir bencana banjir dan diharapkan pembangunannya dituntaskan. Kemudian kinerja pengerukan atau normalisasi sungai yang kini masih berjarak 23 kilometer yang diharapkan upaya tersebut juga diselesaikan.

Bagi warga memang bencana tidak ada yang mudah tetapi dibalik itu ada rasa syukur dan mengingat kepada yang maha kuasa. Terimakasih anda telah memanusiaikan manusia. Teruntuk pihak yang berwajib seperti BPBD dan instansi yang berwenang dan para relawan banjir dimohon untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan dengan ikhlas hati dalam menolong sesama manusia dengan penyediaan bantuan seperti posko banjir, dapur umum, makanan dan fasilitas lainnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustien, C M. 2023. "Evaluasi Layanan Informasi Mitigasi Bencana Melalui Website Pantau Banjir Di Kota Semarang." <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/14241>.
- Anis Ribcalia Septiana, Suprpto, Hilarius Wandan Monica Feronica Bormasa, Amtai Alalsan, Ahmad Mustanir, Muhammad Rais Rahmat Razak, Polikarpus Lalamafu, Triono, Syamsu Rijal Hinfa Mosshananza, Iwan Henri Kusnadi, Sunariyanto, and Delila Anggelina Nahak Seran. 2023. *KEBIJAKAN PUBLIK: TEORI, FORMULASI DAN APLIKASI*. Edited by Ari Yanto. M.Pd. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- ARISKA, R. 2022. "Evaluasi Kebijakan Penanganan Banjir Di Kota Palembang." *Repository.Unsri.Ac.Id*. [https://repository.unsri.ac.id/93363/3/RAMA\\_63201\\_07011381924140\\_0025116209\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/93363/3/RAMA_63201_07011381924140_0025116209_01_front_ref.pdf).
- Fitrianto, Mochamad Rizki. 2020. "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Pada BPBD Kabupaten Kediri)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 006 (02): 197-201. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.02.4>.
- Gunanda, Arkha, and Raldi Hendrotoro Seputro Koestoer. 2023. "Evaluation of Flood Disaster Management Planning: A Comparative Method for Bostwana and Indonesia." *ASEAN Natural Disaster Mitigation and Education Journal* 1 (1): 12-19.



- <https://doi.org/10.61511/andmej.v1i1.2023.134>.
- Gustianto, G, A Suharyanto, and P Pudyono. 2016. "Upaya Penanggulangan Banjir Dengan Perbaikan Alur Sungai Kali Lamong Di Kabupaten Gresik." *Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya* 1 (2): 121229.
- Handoyo, Eko. 2010. "Kebijakan Publik Sebagai Kebijakan Publik." *Jurnal MEDTEK* 2 (3): 78-91.
- Karina, Ayu. 2021. "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA PROGRAM P2KH DI KAWASAN KOTA BANDAR LAMPUNG."
- Kasih, Bayong Tjasyono H., Ina Juaeni, and Sri Woro B. Harijono. 2007. "Proses Meteorologis Bencana Banjir Di Indonesia." *Jurnal Meteorologi Dan Geofisika* 8 (2): 64-78. <https://doi.org/10.31172/jmg.v8i2.12>.
- Li, Xianghai, Mengjie Li, Kaikai Cui, Tao Lu, Yanli Xie, and Delin Liu. 2022. "Evaluation of Comprehensive Emergency Capacity to Urban Flood Disaster: An Example from Zhengzhou City in Henan Province, China." *Sustainability (Switzerland)* 14 (21): 1-16. <https://doi.org/10.3390/su142113710>.
- Mayendri, Fildzah. 2022. "Evaluasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Bumi Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat."
- Pambudi, Rizqi Setyo, and Tri Mulyani Sunarharum. 2023. "Evaluasi Program Dan Kegiatan Tahun 2016-2021 Untuk Penanganan Banjir Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Multidisiplin West Science* 2 (05): 354-63. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i5.326>.
- Peirisal, Tepi. 2024. "EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG," 1-10.
- Reno Sakti Wijayanto, Neny Marlina, MA. 2024. "Evaluasi Kebijakan Penanganan Rob Di Semarang Utara Tahun 2022-2023," 1-21.
- Rijali, Ahmad. 2019. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (33): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rondius, Bayu &. 2019. "Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi," 1-11.
- Wulansari, Yeni, and Indah Prabawati. 2021. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum Di Stasiun Malang Kota Baru)." *Publika*, no. 8: 307-20. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p307-320>.
- Zuhro, Silfiya Fatimatuz. 2023. "Evaluasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *University of Islam Malang (Repository)*, 1-23.
- ZUTHFIYAH, RIZQIYATU. 2022. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG" 33 (1): 1-169.
- Sugiyono, S. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. *Bandung: Cv. Alfabeta*.